

ABSTRAK

Pasca pemilihan umum Presiden 2019 ada beberapa kalangan yang mengemukakan gagasan mengenai Pemilihan Presiden agar dilakukan dengan cara dipilih kembali oleh MPR. Gagasan tersebut muncul karena ada beberapa alasan diantaranya Pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung selama ini mengeluarkan biaya yang sangat mahal, tidak sesuai dengan dasar sila ke-4 Pancasila, mengakibatkan adanya *money politics* dan proses pemilihan yang begitu Panjang serta rumit. Tidak sedikit dari beberapa kalangan tidak setuju atas gagasan tersebut. Alasan tidak setuju karena pilpres jika dikembalikan lagi kepada MPR, akan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Prinsip alasan yang dikemukakan mengapa Presiden sebaiknya kembali dipilih oleh MPR adalah karena mengenai sistem yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Maka akan lebih tepat jika kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kemungkinan mengembalikan Pemilihan Presiden oleh MPR, dan implementasi perkembangan Demokrasi di Indonesia atas pemilihan Presiden oleh MPR.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan tafsir. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan wawancara kepada pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian serta menafsirkan dengan cara menganalisis sejauhmana kemungkinan gagasan itu akan terjadi.

Diperoleh kesimpulan bahwa gagasan pemilihan Presiden oleh MPR sejauh kemungkinan bisa terjadi kembali dengan mempertimbangkan kekurangan dari pemilihan Presiden secara langsung yang selama ini dilaksanakan dan tidak mengurangi perkembangan Demokrasi di Indonesia, karena hanya mengubah sistem Demokrasi dari Sistem demokrasi langsung ke sistem Demokrasi tidak langsung.

Kata kunci: Pemilihan Umum Presiden, MPR, Demokrasi.

ABSTRACT

After the presidential election of 2019, there were several people who expressed the idea of the presidential election to be done by being re-elected by the MPR. The idea arises because there are several reasons such as the presidential election that is done directly during this cost is very expensive, not in accordance with the basic number 4 Pancasila, resulting in the existence of money politics and the long and complicated elections. Not few of some circles disagree on the idea. Reason not agree because the presidential election if returned again to the MPR, will be contrary to article 1 Paragraph (2) Constitution 1945 in principle the reason why the president should be re-elected by the MPR is because of the system that the nation Indonesia, the Pancasila democracy. Then it would be more appropriate if the highest sovereignty that was in the people's hands was done entirely by the MPR. The problem in this study is how the possibility of returning the presidential election by the MPR, and implementation of democracy development in Indonesia over the presidential election by the MPR.

The study used empirical research of empirical and commentary. The data collection techniques of the literature study, conducted by collecting secondary data and interviews to related parties that have to do with this research and interpret it by analyzing how likely the idea would be Happen.

It comes to the conclusion that the final idea of the presidential election by the MPR could have occurred again considering the shortcomings of the direct presidential elections that had been implemented and did not reduce the development of democracy in Indonesian and the presidential election by the MPR will not be able to develop democracy in Indonesia, because ut only converts the system of democracy from the system of democracy directly to the indirect democracy system.

Keywords: Presidential Elections, Consultative Assembly (MPR), Democracy.